

Pemerintah
Kabupaten pamekasan



Renja

RENCANA KERJA

KABUPATEN PAMEKASAN 2023

KECAMATAN KADUR



**RENCANA KERJA
KECAMATAN KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023**



**KECAMATAN KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadur merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kadur yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kecamatan Kadur . Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Kadur disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Kadur . Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kadur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.



Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Kadur tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 11 April 2023

KECAMATAN KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN



MOHAMMAD JASIN, M.Si

Pembina Tk I/IV-b
NIP. 19681206 198903 1 009



DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematikan Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional	20
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	21
2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Isu Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023.....	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V PENUTUP	44



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Kadur	11
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Kabupaten Pamekasan	13
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan	18
Tabel 2.4	Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Pamekasan	24
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Pamekasan	29
Tabel 3. 1	Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pamekasan	31
Tabel 3. 2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kadur	31
Tabel 3. 3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Pamekasan Kecamatan Kadur	34
Tabel 4. 1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	39



DAFTAR GAMBAR

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	2
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Kecamatan Kadur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Kadur memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Kecamatan Kadur 2023 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Kecamatan Kadur ini disusun dengan upaya

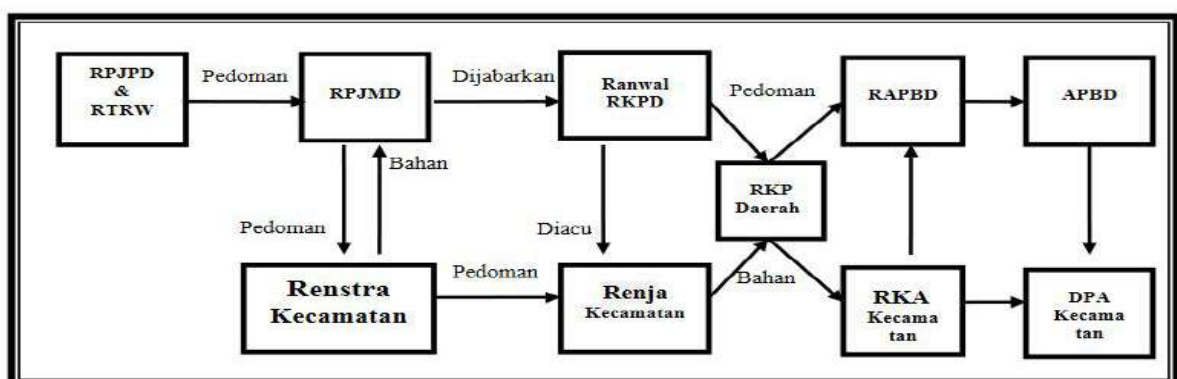


untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Kadur sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Penyusunan Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Kecamatan Kadur yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Kecamatan Kadur tahun lalu dan evaluasi hasil Kecamatan Kadur tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Kadur ; pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Kadur ; perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kadur ; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kadur .

Renja Kecamatan Kadur Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Kadur untuk tahun Ke Lima periode Renstra Kecamatan Kadur 2018-2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Kecamatan Kadur Tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yangdiselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Kecamatan Kadur mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2023, Renstra Kecamatan Kadur , Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Kecamatan Kadur .

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan





Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kadur Tahun 2023, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan selama Tahun 2023 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kadur untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);



31. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
34. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.
35. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 26)

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Kadur adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Kecamatan Kadur dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Kecamatan Kadur dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan 2023 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kadur adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.



- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Kecamatan Kadur .
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematikan Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kadur Kabupaten
Pamekasan

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Kadur Kabupaten
Pamekasan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kadur tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kadur disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;

- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program dan Kegiatan Pada Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

Kecamatan Kadur pada tahun anggaran 2022 tidak ada target yang tidak memenuhi target kinerja namun ada beberapa kegiatan hampir tidak memenuhi target.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

Tabel 2. 1 Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Kadur

No.	Faktor capaian program/kegiatan tidak sesuai target	Faktor capaian program/kegiatan sesuai target	Faktor capaian program/kegiatan melebihi target	Solusi yang dilakukan
1.	Refocusing Anggaran	Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga sebagian besar realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan	Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pihak tentang kegiatan anggaran Kecamatan	Koordinasi dengan bidang terkait
2.		Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia	Masih kurangnya pemahaman tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan diselenggarakan baik kecamatan	
3.		Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan	Belum adanya penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang pasti untuk Kecamatan	

Sumber: Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Kadur

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Terdapat beberapa proram kegiatan yang hingga awal tahun 2023 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai dan terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor



1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasidan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah. yang kemudian disesuaikan kembali Program kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan. Maka terjadi Perubahan indicator Kinerja dan target capaian program kegiatan Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan Kondisi yang ada.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebutsebagai berikut:

1. Penyesuaian target capaian
2. Efesiensi alokasi belanja
3. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum tercapai target

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kadur tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Kadur yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Pamekasan

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kadur

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7						Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	4,51		4,01		0%	4,51	4,51	1,13
7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
7	01	01	2.01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	'8 Dokumen, 4 Evaluasi	N/A	8	N/A	N/A	8	1	1
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	8	1	7.4%
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	27 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	27	N/A	N/A
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	01	01	2.02	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit	N/A						



7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	N/A	16	22	100	16	22	39.7%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	N/A	12	12	100	12	6	7.8%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	22 ASN	N/A						
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	N/A	17	12	100	22	4	16.50%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	14 jasa	N/A						
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	N/A	12	12	100	12	6	18.18%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	N/A	12	12	100	12	6	27.17%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	30 Sarana	N/A						
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Peralatan	N/A	10	10	100	10	N/A	N/A
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun	1 Sistem	N/A	1	1	100	1	N/A	N/A
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	3 Sarana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	85 Pengadaan Barang	N/A						
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	I Unit	N/A	1	1	100	1	1	34.16%



7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	N/A	1	1	100	1	1	35.80%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang diselenggarakan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	N/A	8	4	50	4	4	13.6%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	100%	N/A	8	4	50	4	4	13.6%
7	01	04	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	N/A
7	01	04	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	N/A	8	4	50	3	3	25.59%
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	200	N/A	N/A
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	200	N/A	N/A
7	01	05	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi < konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	200	N/A	N/A



7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	100%	N/A	10	10	100	10	10	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	N/A	10	10	100	10	10	100%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	N/A	10	10	100	10	10	100%
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	01	06			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	20	5	17.5%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	20	5	17.5%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	10	5	28.42%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kadur sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan			4,01	4,26	4,51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kondisi capaian Tetap
2	Nilai SAKIP			81,30 (A)	81,35 (A)	81,40(A)	A	81,25 (A)	81,35 (A)	81,40(A)	82 (A)	Kondisi capaian Tetap
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			3,80	3,85	3,87	3,75	3,80	3,87	3,87	3,90	Kondisi capaian Tetap
4	Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang ditangani			85 %	90 %	100 %	N/A	N/A	90 %	100 %	100%	Kondisi capaian Tetap
5	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan			88 %	95 %	100 %	N/A	0.13 %	97 %	100,13%	100%	Kondisi capaian Tetap
6	Persentase Desa yang telah dibina			80 %	90%	100 %	N/A	N/A	90%	100 %	100%	Kondisi capaian Tetap

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kadur menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan yang berada di wilayah Kabupaten Pamekasan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta koordinasi kesatuan Bangsa masyarakat kabupaten Pamekasan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja di dalamnya terdapat Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	SPM/stand ar nasional	IKK	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tercapai/ Tidak Tercapai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan			4,26	N/A	
2	Nilai SAKIP			81,35 (A)	N/A	Tidak Tercapai
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			3,85	N/A	Tercapai
4	Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang ditangani			90 %	N/A	Tercapai
5	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan			95 %	N/A	Tercapai
6	Persentase Desa yang telah dibina			90%	N/A	Tercapai

Sesuai dengan uraian di atas maka kinerja pelayanan pada Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan difokuskan pada pelayanan kecamatan yang dapat meningkatkan Tata Kelola



Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah Kecamatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Kompetisi SDM Perencana yang belum proporsional sesuai kebutuhan ideal pekerjaan dan beban kerja
- b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan pasarana kantor masih kurang
- c. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kecamatan masih kurang
- d. Koordinasi antar Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan (Forkopimca) Belum optimalnya
- e. Tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan masih rendahnya
- f. Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah
- g. Tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018–2023, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Pamekasan yaitu ***“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”*** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Pamekasan, yaitu:

- MISI I Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia
- MISI 2 Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan



Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.

- MISI 3 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- MISI 4 Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
- MISI 5 Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah Kecamatan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-3 Kabupaten Pamekasan yaitu: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan urusan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah Kecamatan, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Sarana dan prasarana di kecamatan dan desa yang kurang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
2. Globalisasi teknologi informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi karakter dan budaya local
3. Tersedianya sarana komunikasi dan Informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat

Sedangkan peluang (Opportunities) yang ada, antara lain:



1. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan daerah maupun pembangunan desa
2. Partisipasi dari organisasi sosial, politik dan kemasyarakatan serta lembaga-lembaga non pemerintah yang dapat dijadikan mitra dalam mewujudkan tata pemerintahan dan pemberdayaan serta pelayanan terhadap masyarakat yang baik.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Kadur menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Isu Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kadur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- c. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal RKPD Kecamatan Kadur dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Kecamatan Kadur terdiri dari 6 (enam) program dan 15 (empat belas) kegiatan, Urusan Pilihan Kecamatan Kadur terdiri dari 6 (Enam) program dan 15 (Lima belas) kegiatan. Serta 1 (satu) program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Pamekasan

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kadur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Kadur			2.607.355.572	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Kadur			2.607.355.572	Tetap
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	'8 Dokumen, 4 Evaluasi	90.00.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	'8 Dokumen, 4 Evaluasi	90.00.000	Tetap
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	80.000.000	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Kadur	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	27 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Kadur	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	27 Dokumen	10.000.000	Tetap
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit	1.780.055.572	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit	1.780.055.572	Tetap
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kadur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	1.745.055.572	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kadur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	1.745.055.572	Tetap
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kadur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kadur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.000.000	Tetap
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah ASN yang terfasilitasi	22 ASN	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah ASN yang terfasilitasi	22 ASN	50.000.000	Tetap

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Kadur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Kadur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	50.000.000	Tetap
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	121 jasa	212.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	121 jasa	212.300.000	Tetap
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.300.000	Tetap
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	Tetap
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah sarana yang layak fungsi	70 Sarana	124.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah sarana yang layak fungsi	70 Sarana	124.000.000	Tetap
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kadur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	14.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kadur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	14.000.000	Tetap
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kadur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Peralatan	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kadur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Peralatan	40.000.000	Tetap
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Kadur	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun	1 Sistem	70.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Kadur	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun	1 Sistem	70.000.000	Tetap
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah prasarana yang layak fungsi	3 Sarana	130.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah prasarana yang layak fungsi	3 Sarana	130.000.000	Tetap
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kadur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	130.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kadur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	130.000.000	Tetap
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	20 Pengadaan Barang	221.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kadur	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	20 Pengadaan Barang	221.000.000	Tetap
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kadur	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kadur	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	25.000.000	Tetap

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kadur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	46.000.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kadur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	46.000.000	Tetap
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung Kantor	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung Kantor	150.000.000	Tetap
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kadur	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	100%	48.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Kadur	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	100%	48.000.000	Tetap
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadur	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	23.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadur	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	23.000.000	Tetap
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	23.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	23.000.000	Tetap
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Kadur	Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang diselenggarakan	100%	25.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Kadur	Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang diselenggarakan	100%	48.000.000	Tetap
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.000.000	Tetap
3	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kadur	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	115.000.000	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kadur	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	115.000.000	Tetap
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kadur	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	100%	115.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kadur	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	100%	115.000.000	Tetap

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	25.000.000	Tetap
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	90.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	90.000.000	Tetap
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kadur	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	100%	60.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Kadur	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	100%	60.000.000	Tetap
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kadur	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	100%	60.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kadur	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	100%	60.000.000	Tetap
	Fasilitasi,Koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi<konsultasi)Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Kadur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	60.000.000	Fasilitasi,Koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi<konsultasi)Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kecamatan Kadur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	60.000.000	Tetap
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kadur	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	100%	40.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kadur	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	100%	40.000.000	Tetap
5.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kadur	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	40.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kadur	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	40.000.000	Tetap
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kadur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kadur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	20.000.000	Tetap
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	20.000.000	Tetap



6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Kadur	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	100%	50.000.000	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Kadur	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	100%	50.000.000	Tetap
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kadur	Persentase Desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	50.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kadur	Persentase Desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	50.000.000	Tetap
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kadur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kadur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	30.000.000	Tetap
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	20.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Kadur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	20.000.000	Tetap



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2023 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama Perangkat Daerah :Kecamatan Kadur**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pameksasan Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil



penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pamekasan

No	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sakunder dan pariwisata	a. Perikanan dan Kelautan terhadap PDRB b. Percepatan Penumbuhan Wira Usaha Baru dan Penempatan Tenaga Kerja c. Mendorong Kemandirian Desa
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta Peningkatan layanan infrastruktur	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, produktivitas dan daya saing ketanakerjaan serta pengentasan kemiskinan	d. Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan e. Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kepedulian social dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan Perlindungan Sosial Masyarakat
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Peningkatan Kontribusi Sektor UMKM, Pertanian, Perikanan dan Kelautan terhadap PDRB
6	Membangun Lingkungan Hidup,	Peningkatan ketahanan bencana dan	f. Penurunan Resiko Bencana Daerah g. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan Hidup



- meningkatkan kualitas
Ketahanna lingkungan
Bencana Dan hidup
Perubahan Iklim;
- 7 Memperkuat Peningkatan Peningkatan Akuntabilitas
Stabilitas ketentraman, Kinerja, Kualitas Pelayanan
Polhukhankan ketertiban umum Publik, dan SPBE
Dan dan Peningkatan terintegrasi dan
Transformasi kualitas Berkelanjutan
Pelayanan pelayanan public
Publik. bagi masyarakat
di jatim

Sumber: Bappeda

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Pamekasan, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kadur Tahun 2023 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik masuk pada misi ke-3 yaitu, Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel Sedangkan, Tujuan dan sasaran Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan berdasarkan Misi ke.3 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kadur

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2023
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas di wilayah Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017	4,51
2		Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Inspektorat Kabupaten	81,40 (A)
3		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	3,87
4		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Presentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang di adakan}}{\text{Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi}} \times 100\%$	100%



				Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
5		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan	Persentase Desa yang masyarakatnya telah diberdayakan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada}} \times 100\%$	100%
6			Persentase Desa yang telah dibina	$\frac{\text{Jumlah Dokumen dan Laporan yang di fasilitasi}}{\text{Jumlah Dokumen dan Laporan}} \times 100\%$	100%

Sumber: Renstra Kecamatan Kadur

3.3 Program dan Kegiatan

Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2023 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023pada awalnya disusun sebanyak 5 program. Namun dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, dilakukan beberapa penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan Renstra 2018-2023, menjadi 6 program, yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, (2)Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, (3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, (4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, (5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,(6) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Kadur secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Pamekasan
Kecamatan Kadur

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kadur

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Kecamatan Kadur		2.607.355.572	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			2.607.355.572
7	01	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Kecamatan Kadur	'8 Dokumen, 4 Evaluasi	90.00.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		'8 Dokumen, 4 Evaluasi	90.00.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadur	8 Dokumen	80.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	80.000.000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Kecamatan Kadur	27 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		27 Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Kecamatan Kadur	1 Unit	1.780.055.572	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.780.055.572
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kadur	22 Orang	1.745.055.572	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		22 Orang	1.745.055.572
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kadur	12 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	35.000.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Kecamatan Kadur	22 ASN	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		22 ASN	50.000.000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kadur	22 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		22 Orang	50.000.000

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kecamatan Kadur	14 jasa	212.300.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		14 jasa	212.300.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kadur	12 Laporan	12.300.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	12.300.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kadur	12 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	200.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Kecamatan Kadur	30 Sarana	124.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		30 Sarana	124.000.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kadur	8 Paket	14.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8 Paket	14.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kadur	10 Peralatan	40.000000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Laporan	40.000000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun	Kecamatan Kadur	1 Sistem	70.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12 Rapat	70.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Kecamatan Kadur	3 Sarana	130.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 Sarana	130.000.000
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Kadur	3 Unit	130.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3 Unit	130.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Kadur	85 Pengadaan Barang	221.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		85 Pengadaan Barang	221.000.000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kecamatan Kadur	1 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Unit	25.000.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Kadur	2 Unit	46.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Unit	46.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kadur	1 Gedung Kantor	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Gedung Kantor	150.000.000

7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	Kecamatan Kadur	100%	48.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	48.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Kadur	100%	23.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	23.000.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadur	4 Dokumen	23.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	23.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang diselenggarakan	Kecamatan Kadur	100%	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadur	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	25.000.000
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kecamatan Kadur	100%	115.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	115.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	Kecamatan Kadur	100%	115.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	115.000.000
7	01	04	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadur	4 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Laporan	25.000.000
7	01	04	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kadur	8 Laporan	90.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8 Laporan	90.000.000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	Kecamatan Kadur	100%	60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	60.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	Kecamatan Kadur	100%	60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	60.000.000
7	01	05	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi < konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Kadur	200 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		200 Orang	60.000.000

7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kadur	100%	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	40.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kadur	100%	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	40.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kadur	10 Lembaga	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Lembaga	20.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kadur	10 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Laporan	20.000.000
7	01	06			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	Kecamatan Kadur	100%	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Kadur	100%	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kadur	10 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	20.000.000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Kadur	10 Laporan	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Laporan	30.000.000
JUMLAH									2,920,355,572				2,920,355,572



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2023. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Kadur pada tahun 2023. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kadur dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2023.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Kecamatan Kadur berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Kecamatan Kadur berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kadur pada tahun 2023 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2023 (Tahun 2023)	
							Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4		5		6		7		8	
7	01	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	20.000.000	35 Dokumen	90.00.000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	8 Dokumen	80.000.000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun			13 Dokumen	5.000.000	14 Dokumen	5.000.000			27 Dokumen	10.000.000
7	01	01	2.02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit	445.013.893	1 Unit	445.013.89	1 Unit	445.013.89	1 Unit	445.013.89	1 Unit	1.780.055.572
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3 Bulan	436.263.893	3 Bulan	436.263.893	3 Bulan	436.263.893	3 Bulan	436.263.893	12 Bulan	1.745.055.572
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	8.750.000	3 Dokumen	8.750.000	3 Dokumen	8.750.000	3 Dokumen	8.750.000	12 Dokumen	35.000.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi			11 Orang	25.000.000	11 Orang	25.000.000			22 ASN	50.000.000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			11 Orang	25.000.000	11 Orang	25.000.000			22 Orang	50.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	3 Jasa	53.075.000	4 Jasa	53.075.000	4 Jasa	53.075.000	3 Jasa	53.075.000	14 jasa	212.300.000

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3.075.000	3 Laporan	3.075.000	3 Laporan	3.075.000	3 Laporan	3.075.000	12 Laporan	12.300.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	12 Laporan	200.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	7 Jasa	3.500.000	8 Jasa	23.500.000	8 Jasa	23.500.000	7 Jasa	3.500.000	30 Sarana	124.000.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.500.000	2 Paket	3.500.000	2 Paket	3.500.000	2 Paket	3.500.000	8 Paket	14.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Peralatan	20.000.000	5 Peralatan	20.000.000			10 Peralatan	40.000.000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun			1 Sistem	70.000.000					1 Sistem	70.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi					3 Unit	130.000.000			3 Sarana	130.000.000
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					3 Unit	130.000.000			3 Unit	130.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	7 Barang	15.250.000	8 Barang	25.250.000	8 Barang	15.250.000	7 Barang	15.250.000	30 Pengadaan Barang	221.000.000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	6.250.000	1 Unit	6.250.000	1 Unit	6.250.000	1 Unit	6.250.000	1 Unit	25.000.000

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	9.000.000	2 Unit	19.000.000	2 Unit	9.000.000	2 Unit	9.000.000	2 Unit	46.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Pengadaan Barang	37.500.000	8 Pengadaan Barang	37.500.000	8 Pengadaan Barang	37.500.000	7 Pengadaan Barang	37.500.000	1 Gedung Kantor	150.000.000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	25%	5.750.000	50%	5.750.000	75%	30.750.000	100%	5.750.000	100%	48.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	25%	5.750.000	50%	5.750.000	75%	5.750.000	100%	5.750.000	100%	23.000.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	5.750.000	1 Dokumen	5.750.000	1 Dokumen	5.750.000	1 Dokumen	5.750.000	4 Dokumen	23.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang diselenggarakan					100%	25.000.000			100%	25.000.000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	25.000.000			1 Laporan	25.000.000
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	25%	28.750.000	50%	28.750.000	75%	28.750.000	100%	28.750.000	100%	115.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase penyelenggaraan	25%	28.750.000	50%	28.750.000	75%	28.750.000	100%	28.750.000	100%	115.000.000

					Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi										
7	01	04	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.250.000	1 Laporan	6.250.000	1 Laporan	6.250.000	1 Laporan	6.250.000	4 Laporan	25.000.000
7	01	04	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	22.500.000	2 laporan	22.500.000	2 laporan	22.500.000	2 laporan	22.500.000	8 Laporan	90.000.000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	25%	15.000.000	50%	15.000.000	75%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	60.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	25%	15.000.000	50%	15.000.000	75%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	60.000.000
7	01	05	2.01	2	Fasilitasi,Koordinasi dan pembinaan (Bimtek,Sosialisasi<konsultasi)Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	15.000.000	50 Orang	15.000.000	50 Orang	15.000.000	50 Orang	15.000.000	200 Orang	60.000.000
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	25%	20.000.000	50%	5.000.000	75%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	40.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	25%	20.000.000	50%	5.000.000	75%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	40.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi	Jumlah Lembaga	10 Lembaga	25.000.000							10	

					Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									Lembaga	20.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	5.000.000	2 laporan	5.000.000	2 laporan	5.000.000	2 laporan	5.000.000	10 Laporan	20.000.000
7	01	06			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	25%	7.500.000	50%	17.500.000	75%	17.500.000	100%	7.500.000	100%	50.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	25%	7.500.000	50%	17.500.000	75%	17.500.000	100%	7.500.000	100%	50.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000			10 Dokumen	20.000.000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	10 Laporan	30.000.000



BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2023.

Penyusunan Renja Kecamatan Kadur sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pamekasan maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Kadur sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2023 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Menyebutkan Indikator di Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 11 April 2023

KECAMATAN KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN



MOHAMMAD JASIN, M.Si

Pembina Tk I/IV-b
NIP. 19681206 198903 1 009



Pemerintah
Kabupaten pamekasan